



**ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN:
STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG
(2018-2023)**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION IMPACT ON ECONOMIC
GROWTH AND POVERTY ALLEVIATION: EMPIRICAL STUDY ON
REGENCIES IN LAMPUNG PROVINCE (2018-2023)***

**Ananda Nayla Rahma Esafitri^{1*}, Suryatama Ekadana², Lidya Shopie Maharani³,
Anggi Renaldi⁴, Alief Rakhman Setyanto⁵**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
Email : naylaraahmaa1211@gmail.com^{1*}, Suryatamaekadana784@gmail.com², lidiashofimaharani@gmail.com³,
anggirenaldi901@gmail.com⁴, aliefrakhmansetyanto@gmail.com⁵

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 21-11-2025

Revised : 23-11-2025

Accepted : 25-11-2025

Pulished : 27-11-2025

This study aims to analyze the influence of Village Fund Allocation (ADD) on economic growth and poverty rates across regencies in Lampung Province during the 2018–2023 period. Panel data analysis was employed, with the most appropriate model selected using Chow, Lagrange Multiplier, and Hausman tests. The results reveal contrasting findings between the two dependent variables. First, ADD yields a statistically insignificant effect on economic growth, suggesting a lack of productive transmission. This suggests that village fund allocations have not effectively stimulated the productive sectors required to drive regional macroeconomic growth. Second, ADD has a significant negative effect on the poverty rate, implying that an increase in village funds is effective in reducing poverty. These findings confirm that the primary function of Village Funds in Lampung Province is currently more aligned with social safety nets and income redistribution rather than serving as an engine for economic growth. Consequently, a policy reorientation in village fund management is necessary to focus more on productive investments for long-term economic impact.

Keywords : Economic Growth, Poverty, Village Fund Allocation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman. Hasil analisis menunjukkan temuan yang kontras antara kedua variabel dependen. Pertama, ADD terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana desa belum mampu menstimulasi sektor produktif yang menjadi pendorong utama pertumbuhan makro daerah. Kedua, ADD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan dana desa efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa fungsi Dana Desa di Provinsi Lampung saat ini lebih dominan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) dan instrumen redistribusi pendapatan daripada sebagai penggerak



pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan tata kelola dana desa agar lebih fokus pada investasi produktif untuk dampak ekonomi jangka Panjang

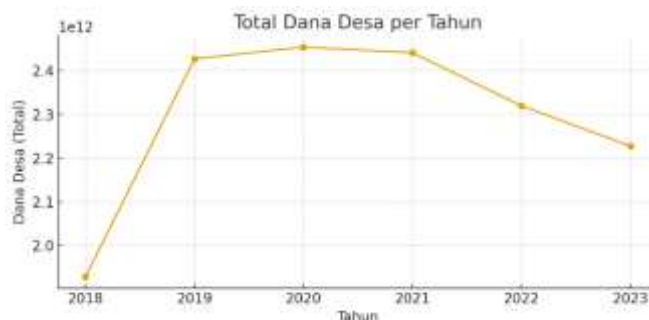
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai peralihan paradigma pembangunan dari pendekatan sentralistik ke desentralistik, memberikan otonomi fiskal dan kewenangan pengelolaan urusan lokal kepada pemerintah desa serta dukungan anggaran signifikan melalui Dana Desa (Antlöv et al., 2016). Desentralisasi fiskal pada tingkat desa diasumsikan dapat mendekatkan pelayanan publik dan menyesuaikan intervensi pembangunan dengan preferensi lokal, yang menurut literatur teori fiskal federalism berpotensi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya lokal (Oates, 1999).

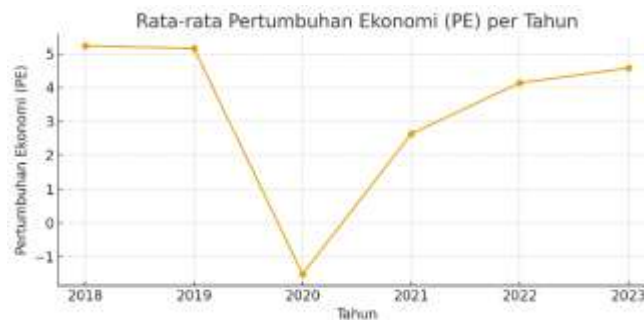
Namun, literatur desentralisasi fiskal juga mencatat risiko kegagalan apabila kapasitas tata kelola lokal rendah. Lewis (2017) mencatat bahwa belanja pemerintah daerah di negara berkembang sering kali terjebak pada pos administrasi yang tidak menstimulasi sektor riil. Jika dana desa lebih banyak dialokasikan untuk proyek fisik non-produktif atau barang habis pakai, maka efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi regional menjadi minim, meskipun mungkin tetap membantu daya beli masyarakat miskin secara jangka pendek.

Di tingkat empiris, Provinsi Lampung menyajikan sebuah paradoks. Data menunjukkan realisasi penyaluran Dana Desa terus meningkat secara nominal selama periode 2018–2023. Namun, tren kenaikan anggaran ini tidak serta-merta diikuti oleh stabilitas pertumbuhan ekonomi; grafik pertumbuhan justru menunjukkan volatilitas tinggi dengan kontraksi tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, dan pemulihan yang moderat setelahnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024). Disparitas antara aliran dana yang terus meningkat dengan output ekonomi makro yang fluktuatif ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas alokasi belanja desa tersebut



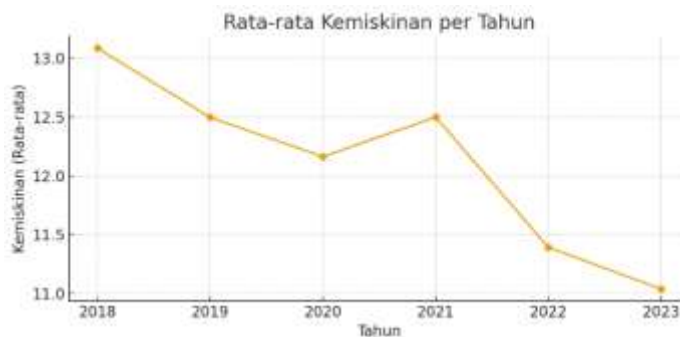
Gambar 1.1 Total Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018–2023

Sumber data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), *Statistik Dana Desa 2018–2023*.



Gambar 1.2 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2018–2023

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), *Provinsi Lampung dalam Angka 2018–2023*.



Gambar 1.3 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2018–2023

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), *Publikasi Kemiskinan dan Ketimpangan 2018–2023*.

Di tingkat desa, tantangan implementasi Dana Desa mencakup masalah kapasitas tata kelola, kecenderungan alokasi konsumtif, transparansi, serta keterbatasan kapasitas SDM untuk merancang investasi produktif yang memberikan efek pengganda (*multiplier effect*). Beberapa studi empiris nasional dan daerah melaporkan hasil heterogen: temuan yang menunjukkan kontribusi positif Dana Desa terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal (Arifin et al., 2020; Hilmawan et al., 2023), namun ada pula studi yang menemukan dampak minimal bahkan negatif terhadap pertumbuhan akibat pola belanja yang kurang produktif (Ritonga & Handra, 2021).

Kesenjangan bukti empiris inilah yang menjadi dasar urgensi kajian lebih lanjut. Banyak penelitian terdahulu bersifat kasus-kasus daerah atau periode singkat sehingga belum memotret dinamika Dana Desa sepanjang fase pra, intra dan pasca-pandemi (2018–2023). Selain itu, sebagian besar studi cenderung menguji satu outcome tunggal (mis. hanya kemiskinan atau hanya PDRB), sehingga bukti mengenai efek simultan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masih terbatas. Kajian komprehensif yang menggabungkan periode pandemi dan dua outcome penting ini masih relatif jarang, khususnya dengan fokus pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung (Mudzakir & Arsitektur, 2025; Wasudewa & Iskandar, 2023). Sebuah studi lain dari Harimurti (2023) menggunakan regresi panel untuk menganalisis



pengaruh Dana Desa, IPM, dan jumlah masyarakat miskin pedesaan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menunjukkan bahwa Dana Desa memang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun variabel lain seperti IPM juga penting (Rr. Shinta Dewi, 2023).

Beberapa kajian kebijakan dan laporan instansi juga menekankan perlunya penguatan perencanaan berbasis SDG/indikator pembangunan, akuntabilitas, serta mekanisme monitoring untuk mengoptimalkan alokasi Dana Desa agar memberikan dampak berkelanjutan (Lestari et al., 2021; Maulina & Umar, 2023; Ristanto, 2022). Dengan konteks tersebut, analisis empiris yang mempertimbangkan aspek pengelolaan, variasi antar kabupaten, dan periode guncangan ekonomi sangat relevan untuk rekomendasi kebijakan daerah pasca-pandemi.

Berdasarkan urgensi teoritis dan gap empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pengentasan kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2018–2023, termasuk menilai heterogenitas dampak antar kabupaten dan peran tata kelola fiskal desa dalam memoderasi hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai efektivitas desentralisasi fiskal di tingkat mikro-regional (*village-level fiscal decentralization*), yang selama ini masih lebih banyak dibahas pada level nasional atau provinsi.

Penelitian yang ada umumnya belum mengombinasikan analisis Dana Desa dengan dinamika pascapandemi Covid-19, padahal periode tersebut menampilkan perubahan signifikan dalam pola belanja desa, prioritas pembangunan, serta mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat. Lebih jauh lagi, terdapat kebutuhan untuk menilai bagaimana variasi kapasitas kelembagaan desa dan arah kebijakan daerah berpengaruh terhadap efektivitas ADD dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Studi oleh Rawi & Munawar (2022) menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola desa berperan sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan berbasis dana transfer (Rawi & Munawar, 2022).

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada literatur desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah dengan: (1) menggunakan panel kabupaten–tahun yang memuat periode 2018–2023 periode yang mencakup fase pra dan pasca awal pandemi; (2) menguji simultan dua outcome kebijakan penting (pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan) sehingga memperlihatkan trade-off antara tujuan produktif dan sosial Dana Desa; dan (3) menyajikan bukti regional spesifik Lampung yang relevan untuk perumusan kebijakan alokasi di tingkat provinsi/kabupaten. Temuan ini menambah pemahaman tentang bagaimana transfer fiskal pada level desa berkontribusi pada pengurangan kemiskinan meski belum tampak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi makro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain data panel seimbang (*balanced panel*) yang mengintegrasikan karakteristik data lintas waktu (*time series*) dan lintas wilayah (*cross-section*). Pemilihan desain panel dilakukan karena pendekatan ini mampu menangkap dinamika perubahan antarperiode sekaligus mengakomodasi perbedaan karakteristik



antarwilayah yang bersifat tetap (*time-invariant*), yang dalam banyak kasus menjadi penyebab bias pada model estimasi murni cross-section maupun time series.

Objek dan Data Penelitian

Data panel yang digunakan mencakup periode 2018–2023 dan meliputi 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria wilayah administratif kabupaten yang menerima transfer Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dua wilayah administratif kota (Bandar Lampung dan Metro) dieksklusi dari observasi karena tidak memiliki struktur pemerintahan desa dan tidak menerima alokasi Dana Desa. Dengan demikian, total observasi berjumlah 78 ($N=13$, $T=6$) dan seluruhnya memenuhi kriteria panel seimbang.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 dan persentase penduduk miskin. Sementara itu, data realisasi penyaluran Dana Desa per kabupaten diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (\ln) untuk menstabilkan varians data dan mengurangi heterogenitas. Variabel dependen terdiri atas dua indikator makro, yaitu: (1) Pertumbuhan Ekonomi (PE), yang dihitung berdasarkan persentase perubahan tahunan PDRB ADHK 2010, dan (2) Tingkat Kemiskinan (KMSKN), yang diukur menggunakan Headcount Index (persentase penduduk miskin).

Model Analisis Data

Metode analisis utama adalah regresi data panel. Penelitian ini mengadopsi prinsip model parsimoni (*parsimonious model*) dengan menempatkan Alokasi Dana Desa sebagai variabel penjelas tunggal. Pendekatan ini dipilih untuk mengisolasi efek bruto (*gross elasticity*) transfer fiskal serta meminimalkan risiko overfitting yang sering terjadi ketika memasukkan terlalu banyak variabel kontrol pada sampel terbatas (Greene, 2012).

Model 1: Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$$PE_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln(ADD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Model 2: Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

$$KMSKN_{it} = \alpha_i + \beta_2 \ln(ADD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi kabupaten i tahun t
- $KMSKN_{it}$: Tingkat Kemiskinan kabupaten i tahun t
- ADD_{it} : Realisasi Dana Desa (logaritma natural)
- α_i : Individual Fixed Effects (konstanta unik setiap kabupaten)
- β : Koefisien regresi
- ε_{it} : Error term
- $i = 1, \dots, 13$ kabupaten
- $t = 2018, \dots, 2023$



Teknik Pemilihan Model Untuk memperoleh model estimasi terbaik (BLUE), dilakukan serangkaian pengujian terhadap tiga model dasar panel: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Tahapan pengujian meliputi:

1. Uji Chow: Membandingkan CEM vs FEM.
2. Uji Lagrange Multiplier (LM): Membandingkan CEM vs REM.
3. Uji Hausman: Membandingkan REM vs FEM untuk menentukan konsistensi estimator.

Uji Diagnostik dan Koreksi Masalah Klasik

Pengujian asumsi difokuskan pada uji normalitas dan heteroskedastisitas. Mengingat data panel lintas kabupaten sering mengalami heteroskedastisitas akibat perbedaan skala ekonomi antarwilayah, penelitian ini menggunakan estimasi Robust Standard Errors (*White Cross-section*). Metode ini mengoreksi standar error agar tetap konsisten terhadap heteroskedastisitas tanpa mengubah nilai koefisien regresi, sehingga inferensi statistik (uji t dan F) tetap valid (White, 1980; Stock & Watson, 2011).

Uji Hipotesis dan Teknik Analisis Statistik

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menganalisis pengaruh Dana Desa secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, serta uji F untuk menilai kelayakan model secara simultan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh proses estimasi dan interpretasi dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews versi terbaru, yang dipilih karena kemampuannya menangani model panel dengan efisien dan menghasilkan output statistik yang presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemilihan Model Estimasi

a. Inkonsistensi Statistik dan Keputusan Model Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1. Uji Chow Model Pertumbuhan Ekonomi

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.442658	(12,64)	0.1704
Cross-section Chi-square	18.673921	12	0.0967

Terdapat fenomena menarik pada pengujian model pertumbuhan ekonomi. Uji Chow menunjukkan probabilitas Cross-section F sebesar 0.1704 (> 0.05), yang secara teknis menyarankan penggunaan Common Effect Model (CEM). Namun, jika berhenti di sini, analisis berpotensi bias. Pengujian lanjutan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM).

**Tabel 2. Uji Lagrange Multiplier (LM) Model Pertumbuhan Ekonomi**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.584408 (0.0103)	439.8361 (0.0000)	446.4205 (0.0000)

Uji Lagrange Multiplier (LM) menghasilkan probabilitas pada Uji Breusch-Pagan 0.0103 (< 0.05). Hasil LM ini krusial karena membuktikan adanya varians error antar-individu yang signifikan, sehingga penggunaan CEM (*Pooled OLS*) menjadi tidak valid karena melanggar asumsi homoskedastisitas antar-unit (Baltagi, 2005). Karena CEM gugur oleh Uji LM, seleksi dilanjutkan antara Random Effect (REM) dan Fixed Effect (FEM) melalui Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman Model Pertumbuhan Ekonomi

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.014781	1	0.0000

Berdasarkan hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas 0.0000 (< 0.05), yang mengindikasikan bahwa error term berkorelasi dengan regressor. Dalam kondisi ini, REM menjadi estimator yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai satu-satunya model yang konsisten, meskipun Uji Chow awal memberikan sinyal lemah.

b. Keputusan Model Kemiskinan

Tabel 4. Uji Chow Model Kemiskinan

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.951078	Mean dependent var	12.11308
Adjusted R-squared	0.941141	S.D. dependent var	3.299764
S.E. of regression	0.800554	Akaike info criterion	2.554122
Sum squared resid	41.01670	Schwarz criterion	2.977121
Log likelihood	-85.61076	Hannan-Quinn criter.	2.723456
F-statistic	95.70803	Durbin-Watson stat	0.804493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4 diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Common Effect Model (CEM) tidak tepat digunakan, dan model yang sesuai untuk mengestimasi pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan adalah Fixed Effect Model (FEM).



Karena FEM terpilih pada tahap ini, analisis selanjutnya perlu dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan apakah FEM atau Random Effect Model (REM) merupakan model estimasi yang paling tepat digunakan.

Tabel 5. Uji Hausman Model Kemiskinan

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.190298	1	0.0073

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada Tabel 5, diperoleh nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0.0073, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ($0.0073 < 0.05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa model Random Effect tidak tepat digunakan, dan Fixed Effect Model (FEM) lebih konsisten dalam menjelaskan pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dengan mempertimbangkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik yang digunakan dalam analisis persamaan ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Jenis Pengujian	Model Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Model Kemiskinan	Keputusan Akhir
Uji Chow	Prob > 0,05 menunjukkan Common Effect Model lebih sesuai	Prob 0,0000 < 0,05 menunjukkan Fixed Effect Model lebih tepat	Dilanjutkan dengan Uji LM dan Uji Hausman
Uji LM (Breusch-Pagan)	Prob 0,0103 < 0,05 menunjukkan Random Effect Model lebih sesuai	—	Dilanjutkan dengan Uji Hausman
Uji Hausman	Prob 0,0000 < 0,05 menunjukkan Fixed Effect Model lebih tepat	Prob 0,0073 < 0,05 menunjukkan Fixed Effect Model lebih tepat	Model yang digunakan pada kedua model adalah FEM

Hasil pemilihan model pada Tabel 6 menunjukkan bahwa baik pada model Pertumbuhan Ekonomi maupun model Kemiskinan, Fixed Effect Model (FEM) terpilih



sebagai model paling tepat. Artinya, perbedaan karakteristik antar daerah seperti kapasitas fiskal, kondisi sosial ekonomi, dan kemampuan pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga tidak bisa diabaikan dalam analisis. Dengan menggunakan FEM, variasi khas tiap daerah dapat dikontrol sehingga hubungan antara Alokasi Dana Desa (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dan Kemiskinan (Y2) dapat diestimasi secara lebih akurat.

Hasil ini juga berarti bahwa ketika masuk ke pembahasan variabel, interpretasi koefisien maupun signifikansi untuk variabel X terhadap Y1 dan Y2 harus didasarkan pada model FEM. Dengan demikian, setiap pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi maupun Kemiskinan akan dibahas dalam konteks bahwa setiap daerah memiliki efek tetap (*fixed effect*) yang sudah diperhitungkan dalam model. Hal ini membuat pembahasan lebih konsisten dan sesuai dengan model terbaik yang telah ditetapkan melalui Uji Chow, Uji LM, dan Uji Hausman.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan interpretasi koefisien regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model memenuhi kriteria statistik yang baik, khususnya terkait distribusi residual dan homogenitas varians.

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Model PE	Model Kemiskinan	Keterangan
Normalitas	Prob 0.004981 < 0.05 (tidak normal)	Prob 0.033657 < 0.05 (tidak normal)	Residual dianggap normal (CLT)
Heteroskedastisitas	Prob 0.0185 < 0.05 (heteroskedastisitas)	Prob 0.7325 > 0.05 (tidak terjadi)	Robust SE digunakan
Multikolinearitas	Tidak Diperlukan	Tida Diperlukan	Aman

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera, residual pada kedua model menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0.05 (Model PE: 0.0049; Model Kemiskinan: 0.0336), yang secara teknis mengindikasikan distribusi tidak normal. Namun, mengingat jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah 78 unit (Cukup Besar > 30), maka asumsi normalitas dapat dilonggarkan dengan mengacu pada Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem*). Menurut teorema ini, pada sampel besar, distribusi sampling dari estimator akan mendekati normal terlepas dari bentuk distribusi populasinya, sehingga uji-t dan uji-F tetap valid secara asimtotik (Wooldridge, 2013).

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan mendeteksi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan kondisi pada kedua model:

- 1) Model Kemiskinan: Nilai probabilitas 0.7325 (> 0.05), yang berarti bebas dari masalah heteroskedastisitas.



2) Model Pertumbuhan Ekonomi: Nilai probabilitas 0.0185 (< 0.05), yang mengindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.

Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas pada Model Pertumbuhan Ekonomi adalah estimator OLS menjadi tidak efisien dan nilai standar error menjadi bias. Oleh karena itu, sebagai langkah korektif, penelitian ini menerapkan teknik estimasi Robust Standard Errors (*White Cross-section*) pada kedua model. Metode ini mengoreksi standar error agar tahan (*robust*) terhadap gangguan heteroskedastisitas, sehingga penarikan kesimpulan statistik tetap akurat tanpa perlu mengubah data.

c. Uji Multikolinearitas

Mengingat spesifikasi model dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen utama (Alokasi Dana Desa), maka uji multikolinearitas tidak relevan untuk dilakukan karena tidak adanya potensi korelasi antar-variabel bebas.

3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Indikator	Model 1: Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	Model 2: Tingkat Kemiskinan (Y2)
Variabel (X)	Ln_DanaDesa	Ln_DanaDesa
Koefisien (β)	-11.8086	-1.6803
Probabilitas	0.1586 (Tidak Signifikan)	0.0340 (Signifikan)
R-Squared (R^2)	0.026 (Rendah)	0.9732 (Sangat Tinggi)
Arah Hubungan	Negatif (Tidak Signifikan)	Negatif (Signifikan)

- Pada Pertumbuhan Ekonomi: Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik ($p > 0.05$). Artinya, secara empiris di Provinsi Lampung, besar kecilnya transfer dana desa tidak menjadi determinan penentu fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pada Kemiskinan: Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan ($p < 0.05$). Nilai koefisien -1.68 menunjukkan elastisitas di mana setiap kenaikan 1% Dana Desa diasosiasikan dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1.68 persen, *ceteris paribus*.
- Analisis R-Squared 0.97 (Model Kemiskinan): Nilai determinasi yang sangat tinggi ini (97%) harus dimaknai dengan hati-hati. Tingginya angka ini sebagian besar disumbangkan oleh peran variabel dummy wilayah (*Fixed Effects*) dalam model, bukan semata-mata variasi Dana Desa. Hal ini wajar dalam model Fixed Effect dengan N yang kecil dan T yang pendek, di mana variabilitas antar-kabupaten (*cross-section variation*) jauh lebih dominan daripada variabilitas waktu. Ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan di Lampung adalah masalah struktural wilayah; faktor lokasi dan karakteristik bawaan kabupaten sangat menentukan level kemiskinan, sementara Dana Desa berperan sebagai variabel intervensi yang signifikan dalam struktur tersebut.



Pembahasan

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Mengapa Dana Desa Gagal Memacu Ekonomi?

Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) menggunakan robust standard errors menunjukkan bahwa variabel IN_DANADESA memiliki koefisien -11.80860 dengan nilai probabilitas 0.1586 , sehingga secara statistik tidak signifikan pada taraf $\alpha = 5$ persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Lampung selama periode 2018–2023. Interpretasi ini diperkuat oleh hasil uji t, yang menyimpulkan bahwa nilai probabilitas $0.1586 > 0.05$ menyebabkan H_0 diterima sehingga Dana Desa tidak terbukti memengaruhi PE atau pertumbuhan ekonomi. Secara empiris hal ini dapat dipahami karena struktur penggunaan Dana Desa di sebagian besar kabupaten lebih diarahkan pada kegiatan pembangunan fisik dasar dan program padat karya jangka pendek yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan sektor-sektor produktif pembentuk PE.

Temuan ini konsisten dengan teori Fiscal Federalism yang dikemukakan (Oates, 1999), yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas alokasi yang efisien dan belanja diarahkan pada sektor produktif yang memberikan multiplier effect tinggi. Analisis ini didukung oleh argumen Lewis (2017) mengenai inefisiensi belanja daerah di Indonesia. Dana Desa di Lampung cenderung terserap ke dalam dua pos utama yang minim multiplier effect: Dalam konteks Provinsi Lampung, belanja Dana Desa selama tahun 2018–2023 relatif didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar desa, bukan investasi produktif seperti pengembangan UMKM, pertanian modern, atau industri rumah tangga. Rendahnya kapasitas manajerial pemerintah desa dalam merancang proyek ekonomi produktif juga menjadi hambatan penting, sebagaimana dicatat pula oleh (Antlöv et al., 2016) bahwa desa masih bertransisi dalam tata kelola penganggaran sehingga orientasi belanja cenderung pada penyerap anggaran, bukan pendorong ekonomi lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memberikan temuan yang serupa (Ritonga & Handra, 2021) menemukan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia akibat dominasi belanja non-produktif. Di daerah lain, (Hilmawan et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa meningkatkan kegiatan lokal, efeknya lebih pada pemerataan pendapatan dan akses infrastruktur, bukan pertumbuhan PE. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa Dana Desa lebih efektif meningkatkan kesejahteraan mikro daripada mendorong pertumbuhan makro daerah.

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)

Berbeda dengan model pertumbuhan ekonomi, hasil estimasi FEM pada model kemiskinan menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien -1.680361 dan nilai probabilitas $0.0340 (<0.05)$. Hasil ini menandakan bahwa setiap peningkatan Dana Desa menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan



di kabupaten Provinsi Lampung. Nilai koefisien yang negatif menegaskan adanya hubungan trade-off, yaitu semakin besar Dana Desa yang diterima suatu kabupaten, semakin menurun tingkat kemiskinannya. Temuan ini sejalan dengan hasil uji t, yang menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga Dana Desa terbukti signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Signifikansi negatif Dana Desa terhadap kemiskinan menegaskan peran vital instrumen ini sebagai mekanisme redistribusi pendapatan. Efektivitas ini dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dan program Padat Karya Tunai (PKTD). Kedua program ini bekerja langsung pada sisi demand (permintaan) dengan menyuntikkan likuiditas tunai ke rumah tangga termiskin (Desil 1 dan 2). Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan time-lag (jeda waktu) untuk investasi berbuah hasil, transfer tunai memberikan dampak instan terhadap kemampuan konsumsi masyarakat miskin, sehingga secara statistik langsung menekan Headcount Index kemiskinan pada tahun berjalan.

Interpretasi ini sesuai dengan teori pembangunan daerah dari (Todaro & Smith, 2014), yang menyebutkan bahwa intervensi pemerintah melalui program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dasar (pendapatan, pekerjaan, layanan publik) akan berpengaruh langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam konteks Dana Desa, mekanisme transfer fiskal ini banyak digunakan untuk program padat karya tunai (PKTD), pembangunan akses jalan desa, pelayanan air bersih, dan program pemberdayaan sosial ekonomi, yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya hidup. Karena efeknya bersifat mikro dan langsung menyentuh rumah tangga, Dana Desa lebih cepat menunjukkan hasil nyata pada pengurangan kemiskinan dibandingkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi makro.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil konsisten (Arifin et al., 2020) menemukan bahwa Dana Desa memiliki dampak besar terhadap penurunan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan layanan dasar (Hilmawan et al., 2023) juga mengungkapkan bahwa Dana Desa secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan melalui penguatan aktivitas lokal dan distribusi pendapatan. R-squared sebesar 0.973260 pada hasil olah EViews menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi kemiskinan di kabupaten-kabupaten Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh Dana Desa dan efek individual kabupaten, sehingga mengindikasikan bahwa Dana Desa merupakan faktor dominan dalam transformasi kondisi sosial masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh Dana Desa terhadap dua indikator kunci pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertama, Dana Desa terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Lampung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa belum mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan P. Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi jangka panjang, inovasi sektor produktif, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal; namun sebagian besar pemanfaatan Dana Desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur



dasar dan kegiatan padat karya jangka pendek yang tidak memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang memadai bagi perekonomian daerah.

Sebaliknya, Dana Desa menunjukkan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan Dana Desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Temuan ini mencerminkan bahwa penggunaan Dana Desa lebih efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan mikro melalui penyediaan layanan dasar, peningkatan aksesibilitas wilayah, program padat karya, serta pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Intervensi langsung terhadap kelompok berpendapatan rendah tersebut memberikan dampak yang lebih cepat dan terukur dibandingkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa Dana Desa lebih berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan daripada sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa efektif dalam mereduksi tingkat kemiskinan namun belum terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah: (1) mempertahankan komponen bantuan sosial (untuk mitigasi kemiskinan), (2) mengalokasikan proporsi tertentu Dana Desa untuk program produktif yang memiliki pengaruh multiplier (mis. dukungan UMKM, pelatihan teknis, modal kerja), dan (3) memperkuat mekanisme monitoring dan pelaporan penggunaan dana pada level desa agar efektivitas belanja dapat diukur. Implementasi blended allocation (gabungan BLT dan investasi produktif) dapat menjadi strategi yang seimbang antara tujuan sosial dan ekonomi.

4. Keterbatasan Penelitian & Saran Lanjutan

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan: pertama, model menggunakan variabel pengendali terbatas sehingga potensi omitted variable bias dapat terjadi; kedua, kemungkinan endogeneity alokasi Dana Desa (penyaluran ke daerah termiskin) belum sepenuhnya diatasi dalam spesifikasi saat ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan kontrol tambahan (mis. belanja daerah per kapita, IPM), mempertimbangkan normalisasi Dana Desa per kapita atau per desa, dan mengupayakan identifikasi kausal (mis. instrument atau natural experiment) untuk memperkuat klaim kausalitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Provinsi Lampung pasca-revisi UU Desa, khususnya dalam periode krusial 2018–2023. Berdasarkan analisis Fixed Effect Model dengan koreksi Robust Standard Errors, penelitian ini menyimpulkan adanya dualisme dampak yang kontras:

1. Inefektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Secara statistik, ADD terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengonfirmasi bahwa belanja desa di Lampung masih terjebak pada pos pengeluaran yang minim daya ungkit (*low multiplier effect*), seperti infrastruktur skala mikro dan belanja operasional birokrasi. Dana desa



belum mampu bertransformasi menjadi engine of growth yang menstimulasi sektor produktif riil untuk menggerakkan PDRB kabupaten.

2. Efektivitas sebagai Jaring Pengaman Sosial: Sebaliknya, ADD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa Dana Desa di Lampung berfungsi efektif sebagai instrumen redistribusi pendapatan (pro-poor). Melalui mekanisme transfer langsung (BLT-Dana Desa) dan program Padat Karya Tunai, dana desa berhasil menjaga daya beli kelompok rentan (Desil 1 dan 2), sehingga secara langsung menekan angka kemiskinan (Headcount Index), meskipun tidak memacu pertumbuhan makro.

Implikasi Kebijakan: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Provinsi Lampung perlu melakukan reorientasi tata kelola anggaran. Ke depan, penggunaan Dana Desa tidak boleh lagi hanya berfokus pada fungsi “Bantalan Ekonomi”(Economic Buffer) atau pembangunan fisik konsumtif. Diperlukan pergeseran prioritas menuju investasi produktif—seperti korporatisasi pertanian melalui BUMDes dan hilirisasi produk lokal—agar Dana Desa dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang mandiri, bukan sekadar ketergantungan pada transfer pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024).
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons.
- Dewi, H. R. S. (2023). Analisis pengaruh dana desa, indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah masyarakat miskin pedesaan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(3), 405–418.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed.). Boston: Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Paulus, A., Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., Wardhana, I. W., Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., & Tenrini, R. H. (2021). *The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals Abstract: The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. 1.*
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707.



- <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Maulina, R., & Umar, U. T. (2023). *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG)*. 16, 16–29.
- Mudzakir, A. M.(2025). *Dampak Dana Desa terhadap Ketimpangan Desa-Kota di Indonesia*. 9(2), 112–122.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Rawi, & Munawar, M. (2022). Audit quality , audit committee , media exposure , and Corporate Social Responsibility. *Jurnal Siasat Bisnis*, 26(1), 85–96. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol26.iss1.art6>
- Ristanto, A. (2022). PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI GORONTALO. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 4(2), 165–176.
- Ritonga, A., & Handra, H. (2021). *Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat The effect of village funds on economic growth and poverty in West Sumatera*. 16. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Rizki, M., & Erza, O. (2024). *Pengaruh Realisasi Transfer Dana Desa terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 62 Kabupaten di Indonesia*. 2(4).
- Rr. Shinta Dewi, H. (2023). ANALISIS PENGARUH DANA DESA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN JUMLAH MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(03), 405–418.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*.
- Wasudewa, A. A. N. G., & Iskandar, D. A. (2023). *Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Regional di Indonesia*. 7(2), 138–150.